



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK  
NOMOR : 236 TAHUN 1989

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM INTENSIFIKASI  
SERAT KARUNG RAKYAT MUSIM TANAM TAHUN  
1989 / 1990  
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: Bahwa dalam rangka usaha meningkatkan pendapatan petani, meningkatkan produksi serat karung rakyat, mengurangi ketergantungan serat Impor dan memperluas lapangan kerja, maka sebagai tindak lanjut Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 18 Agustus 1987, Nomor 270 Tahun 1987 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Intensifikasi Serat Karung Rakyat Musim Tanam Tahun 1987/1988 di Jawa Timur, dipandang perlu menetapkan pelaksanaan Program Intensifikasi Serat Karung Rakyat Musim Tanam Tahun 1989/1990 di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perintahan di Daerah ;
2. Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali BIMAS Nomor : 09/SK/Mentan/BIMAS/VII/1984 tanggal 6 Juli 1984 tentang Pedoman Tata Laksana Intensifikasi dalam PELITA - IV ;
3. Keputusan Menteri Pertanian tanggal 28 April 1987 Nomor : 257/EPTS/KB.440/4/1987 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Intensifikasi Serat Karung Rakyat ( ISKARA ) ;
4. Keputusan Direktur Jendral Perkebunan Nomor : 20/KB.210 / DJBUN/3/1989 tentang Pelaksanaan Program Intensifikasi Serat Karung Rakyat Musim Tanam Tahun 1989 / 1990 ;

5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur - tanggal 18 Agustus 1987 Nomor 270 Tahun 1987 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Intensifikasi Serat Karung Rakyat Musim Tanam Tahun 1987/1988 di Jawa Timur.

- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 26 Mei 1989 Nomor : 525.1/12514/022/1989 perihal Pelaksanaan Program Iskara Musim Tanam Tahun 1989/1990 di Jawa - Timur ;  
2. Hasil Rapat Satuan Pelaksana BIMAS Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 10 Juli 1989.

#### M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM INTENSIFIKASI SERAT KARUNG RAKYAT MUSIM TANAM TAHUN 1989 / 1990 DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

#### BAB I

##### KETENTUAN UMUM

###### Pasal 1

(1). Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah Tingkat II/Ketua Satuan Pelaksana Bimbingan Massal, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk selaku Ketua Satuan Pelaksana Bimbingan Massal Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- b. Cabang Dinas Perkebunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, ialah Kepala Cabang Dinas Perkebunan Daerah di Nganjuk.

(2). Yang dimaksud dengan singkatan :

- a. SATPEL BIMAS, ialah Satuan Pelaksana Bimbingan Massal Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- b. ISKARA, ialah Intensifikasi Serat Karung Rakyat ;
- c. BPSB, ialah Balai Pengawas dan Sertifikat Benih ;
- d. KMKP, ialah Kredit Modal Kerja Permanen ;
- e. BALITTA, ialah Balai Penelitian Tembakau dan Tanaman Serat ;
- f. PUSLITBANGTRI, ialah Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Industri ;
- g. HIPPA, ialah Himpunan Petani Pemakai Air ;
- h. PT. ASKRINDO, ialah PT. Asuransi Kredit Indonesia ;
- i. PTP. XVII, ialah PT. PERKEBUNAN XVII ( PERSTRO ) ;
- j. UPP, ialah Unit Pelaksana Proyek ;
- k. BPP, ialah Balai Penyuluhan Pertanian ;

- l. KUD, ialah Koperasi Unit Desa ;
- m. BBD, ialah BANK BUMI DAYA ;
- n. PT. PUSRI, ialah PT. (PERSEERO) Pupuk Sriwijaya ;
- o. PPL, ialah Penyuluh Pertanian Lapangan.

### Pasal 2

- (1). ISKARA adalah Penanaman tanaman penghasil Serat Karung yang dilaksanakan dalam usaha meningkatkan produktivitas dan mutu dalam menghasilkan serat karung dengan merupakan teknologi yang dianjurkan, dengan harapan dapat meningkatkan hasil persatuan luas dari usaha tani tanaman serat karung ;
- (2). Intensifikasi adalah penerapan teknologi yang dianjurkan dan merupakan SAPTA USAHA yang meliputi :
  - a. Pemakaian benih Varietas unggul yang dianjurkan ;
  - b. Penggarapan tanah sesuai dengan Pedoman Teknis ;
  - c. Penggunaan pupuk secara tepat dan sekurang-kurangnya sejumlah yang disediakan dalam pedoman kebutuhan Kredit ;
  - d. Pemberian air pada waktu diperlukan ;
  - e. Perlindungan Tanaman terhadap gulma, hama dan penyakit merugikan ;
  - f. Pengingutan hasil sesuai dengan baku teknis ;
  - g. Pengolahan hasil yang tepat guna dan berhasil guna ;
- (3). Periode Musim Tanam Tahun 1989/1990 meliputi kegiatan kegiatan :
  - a. Ponyelenggaraan Pertanaman serat jenis Kenaf dan Yute Tahun bersangkutan ;
  - b. Kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan Program ISKARA Musim Tanam bersangkutan.
- (4). Pengelola ISKARA adalah PTP XVII (PERSEERO).
- (5). Bank Pelaksana Program ISKARA Musim Tanam Tahun 1989 / 1990 adalah Bank Bumi Daya ( BBD ).

### Pasal 3

- Program ISKARA dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut :
- a. Meningkatkan pendapatan petani ;
  - b. Membuka dan memperluas lapangan kerja ;
  - c. Meningkatkan produksi serat untuk menemui kebutuhan serat karung guna mengurangi ketergantungan pada serat karung Import menuju swasembada dan sekaligus meningkatkan devisa ;

#### Pasal 4

- (1). Petani peserta Program ISKARA terdiri dari :
  - a. Pemilik tanah yang mengusahakan tanaman serat karung rakyat diatas milik sendiri ;
  - b. Pemegang bengkok atas sebidang tanah yang mengusahakan tanaman serat karung ;
  - c. Petani penggarap yang diberi surat kuasa oleh pemilik tanah yang diusahakan minimal 2 Musim Tanam ber turut-turut dan disyahkan oleh Kepala Desa, dengan ketentuan bahwa luas tanah garapan termasuk tanah miliknya sendiri tidak lebih dari 2 (dua) hektar.
- (2). Petani peserta ISKARA dimaksud ayat (1) pada pasal ini dilarang memindah tangankan tanaman serat karung yang diusahakannya kepada pihak lain.
- (3). Siapapun yang mengusahakan tanaman serat karung pada tanah milik orang lain dengan cara sewa tidak dapat menjadi peserta ISKARA.
- (4). Petani peserta ISKARA mengusahakan tanaman serat karung dengan resiko sendiri.
- (5). Petani peserta ISKARA berkewajiban mentaati ketentuan - Program ISKARA yang ada.

#### BAB II

##### PROYEKSI LUAS AREAL DAN PRODUKSI

#### Pasal 5

- (1). Proyeksi luas areal ISKARA Musim Tanam Tahun 1989/1990- di Nganjuk ditetapkan seluas 2.500 Ha dilahan Bonorowo.
- (2). Pelaksanaan ISKARA Musim Tanam Tahun 1989/1990 seluas - dimaksud ayat (1) pasal ini diajukan di 9 (sembilan) Wilayah Kecamatan, meliputi Wilayah Kecamatan Jatikalen , Patianrowo, Sukomoro, Gondang, Kertosono, Baron, Lengkong, Tanjunganom dan Prambon.
- (3). Proyeksi Produksi ISKARA Musim Tanam Tahun 1989/1990 se besar 3.750 ton atau 1,5 ton/hektar.
- (4). Lokasi penanaman ISKARA di Kabupaten Nganjuk pada lahan Bonorowo, serta diselaraskan dengan Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan.
- (5). Lahan-lahan yang kurang produktif berdasarkan hasil pe tak pengamatan (observasi), tidak diikut sertakan dalam Program ISKARA.

### BAB III

#### PENGAIRAN

##### Pasal 6

- (1). PTP. XVII wajib mengusahakan pompa air yang diperlukan untuk pengairan pada lahan Bonorowo.
- (2). Petani yang mempunyai lahan dengan pengairan pompa air dimaksud pada ayat (1) pasal ini, wajib menjadi peserta ISKARA.
- (3). Pompa air dimaksud pada ayat (1)pasal ini tidak diperkenankan untuk kegiatan diluar ISKARA.
- (4). Biaya penggunaan pompa diambilkan dari biaya pengolahan tanah dan besarnya biaya sesuai dengan pengeluaran riil yang meliputi :
  - a. Bahan bakar ;
  - b. Pelumas ;
  - c. Suku cadang (spare part) perbaikan ringan (Service)
  - d. Operator ;
  - e. Keamanan ;
  - f. Ongkos bongkar pasang ;
  - g. Penyusutan.
- (5). Untuk lahan yang memerlukan, PTP XVII menyediakan pompa air untuk perendeman dan besarnya biaya ditentukan atas dasar musyawarah antara PTP XVII dan Petani peserta ISKARA dengan diketahui SATFEL BIMAS Kabupaten Dae rah Tingkat II Naganjuk.
- (6). Dalam hal ini di Daerah Tingkat II tersedia pompa air Bantuan Presiden atau pompa air lain, Bupati Kepala Daerah Tingkat II membantu untuk menyediakan pompa tersebut guna keperluan ISKARA.
- (7). Untuk menjamin keterpaduan dalam pelaksanaan pengairan, petani peserta ISKARA dikoordinasikan dalam wadah - HIPPA dan kelompok tani.

### BAB IV

#### BENIH DAN SARANA PRODUKSI

##### Pasal 7

- (1). Benih yang diperlukan untuk program ISKARA Musim Tanam Tahun 1989/1990 adalah jenis Kenaf (HC) dan Yute (CC).
- (2). Pengadaan benih pokok dan benih sebar oleh PTP XVII Pe nyaluran benih tersebut menjadi tanggung jawab PTP. - XVII sampai kepada ketua Kelompok kegiatan ISKARA.
- (3). Pengadaan benih sebar oleh PTP XVII disertai jaminan sebagai berikut :
  - Daya kecambah benih diatas 70 %, dan daya kecam -

benih sebanyak 15 (lima belas) kilogram dan apabila ternyata daya kecambahnya kurang dari 70 % sehingga jumlah benih tersebut tidak memenuhi populasi tanaman per hektar 375.000 batang, maka PTP XVII akan menambah benih sesuai dengan kebutuhan dan kepada petani tidak akan dibebani biaya tambahan benih lagi. Benih harus terjamin kemanuannya yaitu presentase campuran tidak lebih dari 5 %.

- (4). Sedikitnya 2 (dua) minggu sebelum penanaman benih telah disalurkan sampai tingkat sinder dan segera disalurkan ke petani.

Pengelola melengkapi label terhadap benih yang disalurkan pada petani.

#### Pasal 8

- (1). Harga benih unggul sampai ditempat (franco) Kelompok Tani ditetapkan Rp. 1.200,- (seribu dua ratus rupiah) per kilogram .
- (2). Pengadaan dan penyaluran benih sebar dimaksud, sampai di petani peserta ISKARA dilakukan oleh PTP XVII dan harus memenuhi 5 (lima) tepat yaitu : Tepat Jenis, Jumlah, Harga, Tempat dan Waktu.
- (3). Dinas Perkebunan Daerah Tingkat II bercama anggota SAT PEL BIHAS lainnya bekerja sama dengan BPSB mengadakan pengawasan atas ketepatan waktu, jumlah, mutu benih yang disalurkan kepada petani.

#### Pasal 9

- (1). Sarana produksi berupa pupuk yang dipergunakan untuk program ISKARA musim tanam tahun 1989/1990, adalah pupuk Urea, TSP dan KCL sedangkan pestisida berupa buntiran dan cairan.
- (2). Pengadaan dan penyaluran sarana produksi berupa pupuk sampai LINI IV menjadi tanggung jawab PT. PUSRI sedangkan pestisida menjadi tanggung jawab PT. PERTANI.
- (3). Penyaluran pupuk dan pestisida dimaksud ayat (2) pasal ini dari LINI III sampai LINI IV dilaksanakan oleh PTP XVII.
- (4). Penyaluran pupuk dari LINI IV sampai kepada Ketua Kelompok kegiatan ISKARA dilaksanakan oleh PTP XVII sebesar 80 % dan KKD sebesar 20 % sedangkan pestisida oleh PT. PERTANI.
- (5). Pengadaan dan Penyaluran pupuk serta pestisida dimaksud ayat (2),(3) dan (4) pasal ini harus memenuhi (5 -

Pasal 10.

- (1). Harga pupuk dan pestisida samai ditempat (franco) - keleripok tani ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Pupuk UREA, TSP sebesar Rp. 165,- (seratus enam puluh lima rupiah) dan KCL sebesar Rp. 170,- (seratus tujuh puluh rupiah) setiap kilogram.
  - b. Pestisida berupa butiran sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) setiap kilogram.
  - c. Pestisida berupa cairan sebesar Rp. 12.250,- (dua belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) setiap liter.
- (2). Cabang Dinas Perkebunan Daerah melakukan pengawasan atas penggunaan pupuk dan pestisida untuk Program ISKARA.

BAB V

PERKREDITAN

Pasal 11

- (1). BBD mempunyai fungsi sebagai lembaga per BANKKAN yang bertanggung jawab di bidang perkreditan sedangkan penyeluruhannya melalui Pengelola (PTP XVII).
- (2). BBD menyediakan fasilitas KKPF massal dengan jangka waktu 2 (dua puluh) bulan kepada petani peserta program ISKARA yang membutuhkan, penyediaan kredit bagi petani program ISKARA diberikan dalam bentuk paket yang terdiri benih, pupuk, pestisida dan biaya kerja, kredit untuk biaya kerja diberikan secara tunai sejangan benih pupuk dan pestisida diberikan dalam bentuk natura yang diatur secara giral dalam bentuk Surat Perintah Peminjaman Bulanan.
- (3). Petani peserta program ISKARA dapat menggunakan fasilitas kredit sebagaimana atau seluruhnya sesuai dengan kebutuhan apabila petani peserta program ISKARA mampu membayai sendiri kegiatan Intensifikasi, maka fasilitas kredit tidak perlu dipergunakan, akan tetapi tetap harus melaksanakan penerapan SAPTA USAHA.
- (4). Pedoman paket kredit ISKARA untuk lahan Bonorowo ditetapkan sebesar Rp. 230.250,- (dua ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) per hektar dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

## Pasal 12

- (1). Bagi petani peserta Program ISKARA dapat mengajukan permohonan kredit kepada Bank Pelaksana melalui Pengelola dengan cara mengisi Surat Permohonan Kredit (SPK) dan Perjanjian Kredit (PK), jumlah kredit yang diajukan Petani adalah berdasarkan kebutuhan riil sesuai dengan rencana definitif kelompok tani.
- (2). Penyaluran kredit dari Bank kepada Petani dilaksanakan secara bertahap oleh PTP XVII melalui koordinasi kelompok sesuai dengan jadwal kegiatan pekerjaan dilapangan.
- (3). Pembebaran bunga kepada Petani disesuaikan dengan tahap penyaluran kreditnya.
- (4). Apabila karena sesuatu hal sehingga terjadi kelambatan pencairan kredit, maka PTP XVII wajib menyediakan uang untuk pembiasaan.

## Pasal 13

- (1). Pengembalian kredit dimaksud ayat (1) pasal 11 Kemutus ini dilakukan pada saat Petani menerima hasil penjualan serat kurung ditambah bunga 1% (satu persen) setiap bulan.
- (2). Jika terjadi kegagalan panen akibat bencana alam atau gangguan lainnya diluar kemampuan manusia, maka fasilitas kreditnya diselesaikan menurut ketentuan perbankan yang berlaku dengan dibuat Berita Acara oleh UPP diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat serta PTP XVII dan disyahkan oleh Cabang Dinas Perkebunan Daerah Tingkat II, selanjutnya disampaikan kepada BBD selambat-lambatnya satu bulan setelah terjadi kegagalan panen.
- (3). Untuk lebih melancarkan pengembalian kredit, ditempuh usaha bersama secara terkoordinasi dan terpadu antara Instansi yang tergabung dalam SATPER BINAS dan lain-lain sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1981 tentang Usaha Peningkatan Pengembalian Kredit Program Nasional serta Petunjuk dan tata cara pelaksanaannya.

## BAB VI

### ORGANISASI DAN TATA KERTA

## Pasal 14

- (1). Petani peserta Program ISKARA dibimbing untuk berpartisipasi aktif dalam pengusahaan tanaman serat kurung sejak dari pembukaan lahan sampai dengan pemasaran hasil dalam wadah kegiatan kerja sama kelompok.

- (2). Kelompok kegiatan Program ISKARA adalah bagian dari kelompok tani hamparan yang anggotanya secara bersama-sama mengusahakan serat karung diatas lahan yang dikuasai nya dan diarahkan secara bertahap untuk menjadi anggota KUD.
- (3). Masing-masing kelompok kegiatan ISKARA dipimpin oleh seorang Ketua Kelompok sebagai pemimpin kerja dilapangan, dipilih dari dan oleh petani anggota kelompok tersebut dengan persetujuan petugas Cabang Dinas Perkebunan dan Pengelola setempat.
- (4). Pembinaan Kerja sama diantara Petani dalam suatu kelompok yang bersifat kooperatif dengan ciri-ciri sebagai berikut :
  - a. Terpadu dalam hamparan Usaha Tani.
  - b. Didukung secara aktif oleh anggotanya ;
  - c. Bekerja sama melaksanakan kegiatan dengan pengelolaan Usaha Tani ;
  - d. Mengembangkan azas kepemimpinan dengan mengembangkan suasana keakraban ;
  - e. Dapat berkembang dengan dinamika yang tinggi untuk menyerap teknologi dan menerapkan dalam cara Usaha Tani yang sehat ;
  - f. Keikutsertaan anggota kelompok meliputi pengambilan Keputusan ikut melaksanakan maupun dalam pengawasan.

#### Pasal 15

- (1). Pelaksanaan Koordinasi intergal dan sinkronisasi pengembalian serta pembinaan Program ISKARA dilaksanakan dalam wadah koordinasi pembinaan yang telah ada, yaitu SATPEL BIMAS Tingkat II dan SATPEL BIMAS Tingkat Kecamatan dan Desa.
- (2). Dinas Perkebunan Daerah Tingkat II Nganjuk secara fungsional bertanggung jawab atas pembinaan teknis program, monitoring dan panata usahaan pengelolaan Program ISKARA, serta menyampaikan laporan evaluasi setiap akhir Musim Tanam.
- (3). PTP. XVII bekerja sama dengan U.P.P. melalui Ketua Kelompok untuk melakukan bimbingan teknis operasional yaitu penanaman pemeliharaan tanaman, penebangan dan pengelolaan hasil pada masing-masing kelompok.

BAB VII  
PENERANGAN DAN PENYULUHAN

Pasal 16

- (1). SATPEL BIMAS dan FKPP (Forum Koordinasi Penyuluhan Pertanian) Tingkat II menyelenggarakan penerangan melalui semua media massa yang ada dan memanfaatkan pemuka masyarakat, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dan lain-lainnya.
- (2). Kegiatan penerangan diarahkan kepada pembinaan pendapat umum untuk menggairahkan usaha peningkatan produksi, disamping menimbulkan rasa kebanggaan dan kesedian petani dalam rangka melaksanakan anjuran usaha peningkatan produksi serat karung.
- (3). Penerangan kepada petani kecuali diarahkan agar petani memahami hak serta kewajibannya dalam memanfaatkan fasilitas yang tersedia dalam Program ISKARA juga diarahkan kepada berkembangnya kemampuan kelompok tani.

Pasal 17

- (1). Kegiatan penyuluhan diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran dan mengubah perilaku petani peserta Program ISKARA agar bermotivasi untuk mengusahakan tanaman serat karung diatas tanahnya sendiri.
- (2). Kegiatan penyuluhan dilakukan melalui pendekatan kelompok hamparan dengan bimbingan langsung oleh kelompok penyuluhan (Penyuluh Pertanian Lapangan, Petugas UPP-ISKARA, Petugas Lapangan Perusahan PTP XVII dan Petugas Instansi lain yang terkait dalam penerangan SAPTA USARA).
- (3). Sistem kerja laku ditetapkan disamping untuk menjamin kelancaran arus informasi dan teknologi juga menumbuhkan jiwa kerja sama dalam wilayah kerja penyuluhan pertanian sebagai satu kesatuan Operasional, sehingga berkembang suasana saling pengertian dan saling membantu dalam mewujudkan pola tata tanam.
- (4). Penyuluhan diselenggarakan dengan menerapkan beberapa metode penyuluhan seperti sarasehan, temu lapang, temu wicara, kursus dan lain-lainnya.
- (5). Program penyuluhan disusun oleh BPP yang mengatur pelaksanaan Operasional dari unsur-unsur kelompok penyuluhan pertanian (Penyuluh Pertanian Lapangan, Petugas UPP ISKARA, Petugas Lapangan PTP XVII dan petani sebagai fungsi masing-masing).

- (6). Demonstrasi Plot (DEMPLOT) dan DAM FARM sebagai sarana peragaan teknis budidaya tanaman serat karung dilaksanakan oleh petani terutama di areal baru dengan bimbingan yang Intensif oleh PPL dibantu oleh PTP XVII dan Cabang Dinas Perkebunan Dati II Naganjuk.
- (7). Untuk kelancaran sistem kerja LAKU dimaksud ayat (2) pasal ini petugas lapangan harus membuat jadwal kunjungan ke kelompok tani.

## BAB VIII

### PENASARAN HASIL

#### Pasal 13

- (1). PTP XVII wajib membeli seluruh serat karung yang dihasilkan petani peserta Program ISKARA.
- (2). Petani peserta Program ISKARA wajib menjual semua hasil serat kartungnya kepada PTP XVII.
- (3). Harga pembelian serat karung rakyat per kilogram keping diatas truk PTP XVII ditempat pengumpulan yang telah ditetapkan bersama oleh kelompok tani, PTP XVII dan Cabang Dinas Perkebunan Daerah Tingkat II ditetapkan sebagai berikut :
  - Kenaf (HC) dan Jute (CC).

Kualitas A = Rp. 400,- (empat ratus rupiah).

Kualitas B = Rp. 360,- (tiga ratus enam puluh rupiah).

Kualitas C = Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).
- (4). Kriteria Kualitas ditetapkan sebagai berikut :
  - Kualitas A. - Warna putih mengkilat, bebas dari akar dan kulit kotoran/kliko dan panjang serat minimal 150 Cm (seratus lima puluh sentimeter).
  - Kualitas B. - Warna kecoklat-coklatan, mengkilat, bebas dari akar dan kulit/kliko dan panjang serat minimal 125 Cm (seratus dua puluh lima sentimeter).
  - Kualitas C. - Warna coklat/gelap, berakar, kulit kotoran/kliko maksimal 7% dan panjang serat minimal 100 Cm (seratus sentimeter), dengan ketentuan :
    - a. Kalau serat karung terdapat akar dikenakan rafaksi maksimal 3% (tiga persen).
    - b. Kalau serat karung terdapat kulit/kliko dikenakan rafaksi maksimal 4% (empat persen).
    - c. Apabila karena sesuatu hal mewajibkan perhitungan lampau ketentuan tersebut pada a dan b ayat ini, maka diminta agar memperbaiki mutu serat karung kembali.

Kelompok tani beserta datpal Kecamatan menyediakan contoh - contoh serat sesuai dengan jenis dan kualitas ditempat-tempat pembelian yang disyahkan oleh SATTEL BIMAS Kabupaten.

- (5). Kadar air serat karung yang dapat diterima adalah 13 % - (tiga belas persen) kalau kadar air serat karung yang lebih dari 13% (tiga belas persen) dikenakan potongan tukar barang/rahalan sesuai dengan tingkat kadar airnya.  
Maksimal kadar air serat karung yang dapat diterima adalah 16% (enam belas persen).

#### Pasal 19

- (1). Jual beli serat karung dilakukan secara tunai segera setelah petani menyerahkan dan ditimbang serat karungnya - petani peserta Program ISKARA menerima harga serat karung setelah dipotong besarnya pinjaman kredit ditambah bunga sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1) keputusan ini. Jadwal waktu pembelian ditetapkan bersama antara Pj. Kas Perkebunan Daerah Tingkat II, PTP XVII dan petani.
- (2). Untuk Daerah-daerah yang terpencil dan potensial masalah pengangkutan/pembelian serat dibentukkan sebagaimana berikut:
- a. - Sepanjang Kepala Desa dan Camat menanggung biaya serat karung (dari resiko kehilangan dan pengangkutan) maka serat tersebut dibeli dahulu oleh PTP XVII selanjutnya dititipkan sementara ditempat yang sudah ditentukan cari bil manungsa saat pengangkutan.
  - b. - Apabila Kepala Desa dan Camat atau pihak lain yang tidak bersedia menanggung biaya serat karung di maksud, maka biaya pengangkutan ditanggung bersama-sama antara petani peserta dan PTP XVII.
- (3). Pengetahuan dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan secara bertahap yang diatur sesuai dengan hasil penjualan serat karung sebagai berikut :
- a). Untuk penjualan pertama petani peserta diwajibkan mengembalikan pinjaman (polok kredit ditambah bunga = 1% perbulan) sebesar 50% dari hasil penjualan.
  - b). Untuk penjualan kedua dan berikutnya petani peserta diwajibkan mengembalikan sisa pinjaman (sisa pokok + kredit ditambah bunga) 50% dari hasil penjualan sampai seluruh pinjaman kreditnya lurnas.
  - c). Penjualan sebatas harung 50%, perkiraan produksi yang ditugaskan wajib dilunasi.
  - d). Jalan-jalan petani peserta mengakibatkan kerugian pengangkutanya sekaligus (penjualan hasil produksi dilakukan sekali) maka petani dibebaskan tanggungan seluruh

pinjamannya ( pokok kredit ditambah bunga 1 % per bulan ) dari hasil penjualan serat.

- (4). Apabila terjadi sengketa dalam penentuan kualitas serat-karung antara petani peserta Program ISKARA dengan PTP. XVII maka Cabang Dinas Perkebunan Daerah Tingkat II menjadi penengah dan menyelesaikan atas dasar musyawarah.
- (5). Jual beli hasil dalam bentuk batang segar harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perkebunan.

## BAB IX

### PEMBINAAN

#### Pasal 20

- (1). Biaya-biaya pengusahaan serat karung berupa penggarapan-tanah pemeliharaan tanaman, sarana produksi, tebang, pengolahan hasil dan pengangkutan sampai diatas truk PTP . XVII adalah menjadi tanggungan petani.
- (2). PTP. XVII bertanggung jawab atas biaya-biaya :
  - a. - Untuk bimbingan dan pengawasan teknis di lapangan - yang dilakukan oleh PTP. XVII.
  - b. - Imbalan jasa untuk pengurus kelompok sebesar 2,5 % (dua setengah persen) dari hasil penerimaan bersih-kelompoknya.
  - c. - Pengadaan benih sebar.
- (3). Biaya-biaya untuk koordinasi pembina, monitoring, penata usahaan dan penyuluhan sepanjang dilaksanakan oleh Cabang Dinas Perkebunan Daerah Tingkat II dan apabila di bawahnya dikelola pada Daftar Isian Lucyrik Dinas Perkebunan Daerah Tingkat II serta biaya lain yang harus diatur oleh Bupati Kecamatan Daerah.

#### Pasal 21

- (1). Bahai Penelitian Terbaktui dan Tanaman serat bertanggung-jawab atas biaya-biaya untuk keperluan pengadaan benih - penjenis dan penelitian untuk Program ISKARA.
- (2). Pungutan-pungutan untuk keperluan apapun dari hasil serat karung tidak dibenarkan, kecuali apabila Pemerintah menyetujui.

## BAB X

### PEDOMAN PELAKUAN

#### Pasal 22

Ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 - sampai dengan pasal 22 Keputusan ini merupakan Pedoman bagi-Camat, Kepala Wilayah Kecamatan di Kabupaten Daerah

Tingkat II Nganjuk dalam menentukan kebijaksanaan setempat - sesuai dengan kondisi Wilayah masing-masing.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

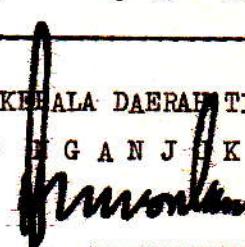
#### Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, - akan ditentukan kemudian sepanjang mengenai pelaksanaannya.

#### Pasal 24

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K  
TANGGAL : 2 - 10 - 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K  


Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1.Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
- 2.Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Sura - baya.
- 3.Sdr. Kepala Dinas Perkebunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
- 4.Sdr. Pimpinan PTP XVII (PERSERO) - Perkebunan Serat Jatim I di - Jombang.
- 5.Sdr. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Sura - baya.
- 6.Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
- 7.Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- 8.Sdr. Pimpinan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- 9.Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten - Daerah Tingkat II Nganjuk.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan  
kepada :

Drs. IBNU SALAM

- Yth. 1.Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat  
I Hawa Timur di Surabaya.
- 2.Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen  
Pertanian Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Sura -  
baya.
- 3.Sdr. Kepala Dinas Perkebunan Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa  
Timur di Surabaya.
- 4.Sdr. Pimpinan PTP XVII (PERSERO) -  
Perkebunan Serat Jatim I di -  
Jombang.
- 5.Sdr. Kepala Dinas Pertanian Tanaman  
Pangan Daerah Propinsi Daerah-  
Tingkat I Jawa Timur di Sura -  
baya.
- 6.Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
- 7.Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Daerah  
Tingkat II Nganjuk.
- 8.Sdr. Pimpinan DPRD Kabupaten Daerah  
Tingkat II Nganjuk.
- 9.Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten -  
Daerah Tingkat II Nganjuk.
- 10.Sdr. .....

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1989

S e r i : D2 Tanggal - 2 OCT 1989

N o m o r : 41.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Sekretaris Wilayah/Daerah

DRS. SOEBAGIO  
NIP 010 052 820

- 10.Sdr. Kepala Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa - Timur di Nganjuk.
  - 11.Sdr. Kepala Cabang Dinas Perkebunan Daerah Propinsi Daerah - Tingkat I Jawa Timur di Nganjuk.
  - 12.Sdr. Sekretaris Satuan Pelaksana - BIMAS Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
  - 13.Sdr. Kepala DPUD Seksi Pengairan - Brantas di Nganjuk.
  - 14.Sdr. Kepala Kantor Departemen Peningkatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
  - 15.Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II - Nganjuk.
  - 16.Sdr. Kepala Pemasaran PT. PERTANI- di Nganjuk.
  - 17.Sdr. Kepala Daerah Tanaman PT. PERKEBUNAN XVII di Nganjuk.
  - 18.Sdr. Kepala Bagian Perekonominan - Kabupaten Daerah Tingkat II - Nganjuk.
  - 19.Sdr. Camat Jatikalen, Patianrowo , Sukomoro, Gondang, Kertosono, Baron, Lengkong, Tanjunganom dan Prambon.
  - 20.Sdr. Pimpinan Cabang BANK BUMI - DAYA di Kediri.
-

**PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM INTENSIFIKASI SERAT  
KARUNG RAKYAT MUSIM TANAM TAHUN 1989 / 1990 DI -  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

---

**I. D A S A R**

Sudah Cukup Jelas.

**II. KETENTUAN UMUM.**

1. Pengertian Musim Tanam Tahun 1989/1990, periode Musim Tanam Tahun 1989/1990 meliputi kegiatan penanaman ISKARA Musim Tanam Tahun 1989/1990 dialokasikan pada lahan Bonorowo.
2. Pengelola Prpgram ISKARA adalah PTP XVII (PERSERO) Daerah Tanaman Nganjuk.
3. Bank Pelaksana Program ISKARA Musim Tanam Tahun 1989/1990 adalah Bank Bumi Daya Cabang Kediri.

**III. ORGANISASI DAN TATA KERJA.**

Sudah Cukup Jelas.

**IV. PENERANGAN DAN PENYALURAN.**

1. Untuk menggairahkan kelompok dalam meningkatkan produksi serat karung maka diadakan lomba antar kelompok tersebut dengan berpedoman petunjuk yang ada.

**V. PENYEDIAAN AREAL.**

a. Proyeksi Areal

1. Untuk lebih memantapkan penyediaan lahan tanaman ISKARA, maka Satuan Pelaksana BIMAS Tingkat Desa dan dibantu Anggota Panitia Desa, Petugas PTP XVII mengatur pelaksanaan dilahan Bonorowo Musim Tanam Tahun 1989/1990 - dalam keserasian dan keterpaduan Program ISKARA dan Program Intensifikasi tanaman lain yang disyahkan dalam Rembug Desa.

Diluar lahan Bonorowo tidak diperkenankan ada tanaman ISKARA.

Camat selaku Ketua Satuan Pelaksana BIMAS Tingkat Kecamatan bertanggung-Jawab sepenuhnya terhadap Pelaksanaan ISKARA di Wilayahnya.

2. Apabila suatu Desa pemasukan arealnya tidak dapat memenuhi sasaran yang telah ditentukan, maka Camat selaku Ketua Satpel BIMAS Tingkat Kecamatan dapat mengalihkan ke Desa lain sepanjang Desa tersebut terdapat ploting-area sesuai Keputusan Bupati Kepala Daerah dan masih dalam lahan Bonorowo dengan memperhatikan plafon kredit serta pelaksanaannya harus dilaporkan kepada Bupati Kepala Daerah selaku Ketua Satpel BIMAS Tingkat II Nganjuk.
3. Apabila ternyata di Wilayahnya terdapat persewaan tanah untuk tanaman - ISKARA maka Camat selaku Ketua Satpel BIMAS Tingkat Kecamatan wajib membatalkan persewaan tersebut dan diserahkan kembali pengelolaannya kepada pemilik.
4. Camat bersama Kepala Desa berkewajiban menyediakan areal untuk tanaman - ISKARA Musim Tanam Tahun 1989 / 1990.

**b. Pendaftaran Petani Calon Peserta ISKARA.**

1. Pendaftaran Petani calon peserta program ISKARA disahkan oleh Kepala Desa selambat-lambatnya tiga setengah bulan sebelum masa tanam sesuai dengan kondisi Wilayah, lahan serta jenis tanaman yang akan ditanam.
- . 2. Daftar petani tersebut pada butir 1 diatas diketahui oleh petugas lapangan pengelola, selanjutnya diteruskan kepada pengelola untuk mendapatkan proses lebih lanjut.
3. Pendaftaran petani peserta ISKARA dengan menggunakan model T. yang ditanda tangani petani peserta dan Ketua Kelompok, diketahui Kepala Desa , Sinder dan Petugas Dinas Perkebunan/PPL selanjutnya disahkan oleh Kepala Daerah Tanaman Nganjuk.
4. Setelah Model T. diserahkan kepada PTP XVII (PERSERO) Daerah Tanaman Nganjuk dibuatkan SPK/PK lalu dimintakan tanda tangan kembali kepada Petani peserta dan Ketua Kelompok serta Kepala Desa, Sinder Wilayah kemudian disahkan oleh PTP XVII (PERSERO) Daerah Tanaman Nganjuk dan Cabang Dinas Perkebunan di Nganjuk yang selanjutnya diserahkan kepada Bank Bumi - Daya Cabang Kediri untuk pengajuan Pencairan Kredit.
5. Biaya meterai sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) untuk SPK/PK menjadi beban PTP. XVII, dengan rincian sebagai berikut :
  1. - S P K : Rp. 1.000,-
  2. - Lampiran S P K : Rp. 1.000,-
  3. - P K : Rp. 1.000,-
  4. - Daftar data peminjam: Rp. 1.000,-
  5. - Perjanjian pengelolaan antara KK dengan PTP. XVII.

**IV. PERKREDITAN.**

- a. Pembebanan bunga kepada petani dihitung sejak droping pupuk tahap pertama pada kelompok yang bersangkutan.
- b. Jaminan kredit adalah hasil produksi ISKARA yang dibiayai dari kredit usaha Taninya.
- c. Pengembalian kredit beserta bunganya dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan penjualan serat karung oleh petani dengan mengutamakan pelunasan kredit, Apabila tahapan pembelian serat dilaksanakan satukali, maka pelunasan kredit beserta bunganya dilakukan sekaligus. Sedangkan jumlah pembelian sama dengan besarnya kredit ditambah bunga 1% - (satu persen) setiap bulan.
- d. Apabila petani belum dapat melunasi pinjaman kreditnya, maka tunggakan kredit tersebut tetap dikenakan bunga 1% (satu persen) setiap bulan, kecuali disebabkan kegagalan panen.

**VII. PENGAIRAN.**

1. Besarnya biaya kesusutan pompa menjadi tanggung jawab petani, sedangkan besarnya kesusutan Pompa per Unit per Musim Tanam ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kapasitas Pompa 6,5 sampai dengan 9 PK sebesar Rp. 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah).
- b. Kapasitas Pompa 10 sampai dengan 19 PK sebesar Rp. 120.000,- (seratus - dua puluh ribu rupiah).

#### VIII. BENIH DAN SARANA PRODUKSI.

Sudah cukup jelas.

#### IX. POLAKANAN TANAM.

- 1. Waktu pelaksanaan penanaman ISKARA pada lahan Bonorowo, setelah panen gadu selesai, yakni sekitar bulan Agustus - September pada :
  - a. Lahan Bonorowo "Sedang" dapat dilaksanakan dengan sistem monokultur
  - b. Lahan Bonorowo "Dangkal" dapat dilaksanakan dengan sistem monokultur - maupun tumpang sari.
- 2. Waktu tanam harus disesuaikan dengan kesiapan lahan dan varietas yang akan ditanam, yakni :
  - Kenaf (HC - 48) pada bulan September.
  - Kenaf (HC - 53) pada bulan Agustus sampai dengan pertengahan Oktober.
  - Kenaf (HC e 64) pada bulan Agustus sampai dengan pertengahan Oktober.
  - Yute (CC) pada bulan Juli sampai dengan bulan September.

#### X. PRODUKSI DAN PEMASARAN HASIL.

- 1. Tempat-tempat pembelian ditetapkan di tempat yang lokasinya dapat dilalui kendaraan roda empat.
- 2. Pengelola melakukan pembelian serat karung dengan segera pada saat itu juga setelah serat terkumpul. Apabila karena keadaan belum memungkinkan bagi pengelola untuk melakukan pengangkutan setelah pembelian, maka pengelola dapat menyimpan serat yang telah dibelinya digudang sementara yang telah ditetapkan.
- 3. Pengelola mengusahakan/menyewa gudang yang berfungsi sebagai tempat penampungan sementara didekat pembelian.
- 4. Prosedur pembelian serat karung.
  - a. Petani yang seratnya telah siap untuk dibeli, melapor kepada Ketua Kelompok termasuk perkiraan beratnya.
  - b. Berdasarkan perkiraan, setelah terkumpul beberapa ton, Ketua Kelompok melaporkan kepada Pengelola bahwa sejumlah serat di kelompoknya telah siap untuk dibeli serta mengusulkan tempat pool pembelian dikelompoknya.
  - c. Pengelola dibawah koordinasi Satuan Pelaksana BIMAS Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, jadwal disampaikan kepada semua pihak yang terkait - antara lain Pemerintah Daerah, Dinas Perkebunan Daerah/UPP, Pengelola, Ketua Kelompok dan pihak-pihak lain yang terkait dan dianggap perlu. Jadwal pembelian wajib dipatuhi semua pihak, baik sebagai penjual, (Kelompok tani), Pembeli (Pengelola) dan Pengawas/monitoring Pembelian (Dinas Perkebunan Daerah dan Pemerintah Daerah).
  - d. Sesuai dengan jadwal tersebut pada butir c, pengelola membeli hasil se-

Kepada petani yang belum melapor seratnya dapat langsung dibeli pula hanya apabila dana dan alat angkut yang tersedia pada pengelola masih memungkinkan.

- e. Kelaompok tani diberi kesempatan untuk membawa seratnya langsung ke Gudang pengelola atau Gudang yang disetujui oleh Pengelola, biaya angkut tetap menjadi beban pengelola dan besarnya biaya angkut dari pool Kelompok Tani ke Gudang tersebut dimusyarahkan antara pengelola dengan ke lompok tani yang bersangkutan.

**XI. PEMBIAYAAN.**

1. Biaya-biaya untuk koordinasi Pelaksanaan Program ISKARA dalam pelaksanannya dimusyarahkan bersama anggota SATPEL BIMAS Tingkat II Nganjuk.

**XII. PEMANTAUAN DAN LAPORAN.**

1. PTP XVII wajib menyampaikan laporan secara periodik tentang Pelaksanaan Program ISKARA dengan segala permasalahannya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk, tembusan Dinas Perkebunan Daerah di Nganjuk dan Sekretaris BIMAS pada setiap akhir bulan dan laporan tersebut sudah diterima paling lambat tanggal 5 pada setiap bulan.
2. Dalam Pelaksanaan Program ISKARA Team Pemantauan dan Evaluasi terdiri dari:
  - Cabang Dinas Perkebunan Daerah di Nganjuk.
  - Sekretaris Satpel BIMAS Tingkat II Nganjuk.
  - PTP. XVII di Nganjuk
  - PT. PERTANI
  - Kantor Departemen Koperasi Kabupaten Nganjuk
  - Bank Bumi Daya Cabang Kediri.

Sedangkan Koordinator adalah Ketua Satuan Pelaksana BIMAS Tingkat II Nganjuk

**XIII. PENUTUP.**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini, akan ditentukan kemudian sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Nganjuk,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

- NGANJUK

Drs. IBNU SALAM

## LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II NGANJUK

TANGGAL : 2 - 10 - 1989

NOMOR : 236 TAHUN 1989.

I. LOKASI DAN LAHAN INTENSIFIKASI SERAT KARUNG RAKYAT  
 MUSIM TANAM TAHUN 1989/1990 DI KABUPATEN DAERAH -  
 TINGKAT II NGANJUK.

NO.	KECAMATAN	D E S A	RENCANA AREAL (Ha)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	JATIKALEN	1. Jatikalen 2. Ngasem 3. Gondang Wetan 4. Begendeng 5. Munung 6. Pulowetan 7. Perning 8. Dawuhan	125 50 15 120 5 4 5 1	
			Jumlah	325
2.	LENGKONG	1. Jegreg 2. Kedungmlaten 3. Banjardowo 4. Prayungan 5. Lengkong	50 170 50 12 25	
			Jumlah	307
3.	GONDANG	1. Nglinggo 2. Mojoseto 3. Ketawang 4. Senjayan 5. Sumberejo 6. Kedungglugu 7. Ja'an	110 40 20 20 10 25 135	
			Jumlah	360
4.	KERTOSONO	1. Kutorejo 2. Nglovak	5 5	
			Jumlah	10
5.	PRAHON	1. Sugihwaras 2. Baleturi 3. Rowoharjo	5 5 5	
			Jumlah	15

1	2	3	4	5
6.	SUKOMORO	1. Kedungasoko 2. Ngelundo 3. Mlintaran 4. Sunengko 5. Kerami 6. Rungur	145 100 65 37 5 <u>10</u>	
			Jumlah	412
7.	B A R O N	1. Nabung 2. Katerban 3. Jambi	27 80 <u>8</u>	
			Jumlah	115
8.	PATIAHNGO	1. Tirtokinsugun 2. Reworwerto 3. Igrombot 4. Sukur 5. Ngempus 6. Babatan 7. Pisang 8. Pelek	292 320 22 12 31 10 10 <u>10</u>	
			Jumlah	707
9.	TANJUNGANOM	1. Panjavanyar 2. Kedungombo 3. Sonobekel 4. Ngadirejo 5. Tambirejo 6. Demancen 7. Kedungrejo	23 8 40 50 40 35 <u>8</u>	
			Jumlah	249

Jumlah Kabupaten Namjuk 2.500

II. DAFTAR REKAPITULASI

NO.	KECAMATAN	JUMLAH DESA	LUAS AREAL ( Ha)
1.	JATIKALEN	8	325
2.	LENGKONG	5	307
3.	GONDANG	7	360
4.	KERTOSONO	2	10
5.	PRAMBON	3	15
6.	SUKOMORO	6	412
7.	B A R O N	3	115
8.	PATIANROWO	8	707
9.	TANJUNGANOM	7	240
-		49	2.500

III. PEDOMAN PAKET KREDIT PER HEKTAR ISKARA  
MUSIM TANAM TAHUN 1989/1990 DI KABUPA-  
TEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK DI LAHAN  
BONOROWO.

NO.	KOMPONEN PAKET KREDIT	Jumlah satuan	Harga Satuan / Rp.	Jumlah Biaya / Rp.
1.	<u>TENAGA KERJA.</u>			
a.	Pengolahan Tanah sampai de- ngan Tanam X)	-	-	50.000,-
b.	Pemeliharaan	-	-	25.000,-
c.	Tebang dan Pengolahan hasil	-	-	30.000,-
d.	Upah penyemprotan	-	-	1.500,-
e.	Sewa alat penyemprotan hama	-	-	1.000,-
	Jumlah :			107.500,-
2.	<u>SARANA PRODUKSI.</u>			
a.	Benih	15 Kg	1.200,-	18.000,-
b.	Pupuk : - UREA - KCL - TSP	300 Kg 50 Kg 100 Kg	165,- 170,- 165,-	49.500,- 8.500,- 16.500,-
	Jumlah :			92.500,-
3.	<u>PESTISIDA.</u>			
-	Berupa Butiran	-	-	18.000,-
-	Berupa Cairan	-	-	12.250,-
	Jumlah :			30.250,-
	JUMLAH :			230.250,-

CATATAN : X). Pengolahan tanah sampai dengan tanam, untuk lahan Bonorowo adalah termasuk untuk sewa pompa air.

XX). Penggunaan Pupuk TSP dan KCL dilahan Bonorowo hanya bila - diperlukan.

IV. PEDOMAN TAHAP-TAHAP PENYALURAN PAKET KREDIT  
PROGRAM ISKARA MUSIM TANAM TAHUN 1989/1990--  
LAHAN BONOROWO KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K.

NO.	URAIAN	PEDOMAN PAKET KREDIT PER HEKTAR.			JUMLAH ( Rp ).
		Tahap I	Tahap II	Tahap III	
1.	<u>TENAGA KERJA.</u>				
	a. Pengolahan tanah sampai dengan tanam. 1).	50.000	-	-	50.000,-
	b. Pemeliharaan	-	25.000	-	25.000,-
	c. Tebang dan Pengolahan hasil	-	-	30.000	30.000,-
	d. Upah penyemprotan 2).	-	1.500	-	1.500,-
	e. Sewa alat penyemprot Hama. 2).	-	1.000	-	1.000,-
	Jumlah Uang	50.000	27.500	30.000	107.500,-
2.	<u>SARANA PRODUKSI.</u>				
	a. Benih 15 Kg	-	18.000,	-	18.000,-
	b. Pupuk : - UREA 300 Kg - KCL 50 Kg - TSP 100 Kg 3).	-	49.500 8.500 16.500	-	49.500,- 8.500,- 16.500,-
	Jumlah nilai Benih dan Pupuk.	-	92.500	-	92.500,-
3.	<u>PESTISIDA.</u>				
	a. Berupa Butiran	-	18.000	-	18.000,-
	b. Berupa Cairan	-	12.250	-	12.250,-
	Jumlah pestisida dan biaya pemberantasan Hama.	-	30.250	-	30.250,-
	T O T A L	50.000	150.250	30.000	230.250,-

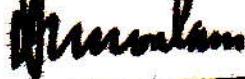
CATATAN : 1). Pengolahan tanah sampai dengan tanam, untuk lahan Bonorowo adalah termasuk untuk sewa Pompa Air.  
2). Jika diperlukan.  
3). Dilahan Bonorowo penggunaan Pupuk TSP dan KCL hanya apabila diperlukan.

KETERANGAN :

- Tahap I : Saat Pengolahan Tanah.  
Tahap II : Setelah Tanaman Tumbuh.  
Tahap III : Satu Minggu sebelum Panen.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

G A N J I K



---

Drs. IBNU SALAM